

MENDAG KUNJUNGI KEJAGUNG

# Siapkan Satgas Impor Ilegal

**JAKARTA (KR)** - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Selasa (16/7). Kedatangan Mendag tersebut untuk membahas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal.

"Beberapa hari ini saya berkoordinasi dan sengaja bertemu mendiskusikan sekaligus minta dukungan, apa yang akhir-akhir ini menjadi polemik di media mengenai terancam tutupnya industri tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, produk kecantikan," tutur Mendag di Kantor Kejagung RI, Jakarta.

Dijelaskan, alasan pembentukan satgas adalah setelah pihaknya menemukan barang yang tidak terdata atau ilegal membanjiri pasar Indonesia. Hal tersebut usai pihaknya berdiskusi panjang dengan sejumlah

lah asosiasi, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Oleh karena itu, kami minta dukungan dari Kejagung untuk membuat tim, segera melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, tentu kami akan serahkan penegakan hukum ke Kejaksaan, kan kami enggak sanggup, agar kita bisa mengurangi barang masuk yang ilegal ini untuk melindungi industri," jelasnya.

Selain Kejagung, Mendag menje-

laskan bahwa satgas akan terdiri dari Kepolisian, Kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian, hingga Kadin. "Lebih cepat, lebih bagus. Mudah-mudahan minggu ini karena ini sudah dalam keadaan darurat," tambah Mendag.

Sementara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengaku akan bersinergi dengan Kemendag dalam satgas yang akan dibentuk tersebut. "Saya mengharapkan ini bukan hanya gebrakan sekali, tetapi sampai tuntas karena kami punya jaringan. Kami tahu jaringan-jaringannya, dan insya Allah saya akan dukung apa yang disampaikan oleh Mendag, dan kami siap untuk tindakan itu, dan mungkin tidak terlalu lama kami akan turunkan tim kami," ujarnya. **(Ant/Has)-f**

KASUS KORUPSI BTS 4G

## Jemy Sutjiawan Dituntut 4 Tahun Penjara

**JAKARTA (KR)** - Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan dituntut pidana selama 4 tahun penjara terkait dengan kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung program BAKTI Kominfo. Selain pidana penjara, Jemy turut dituntut hukuman denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Pidana penjara tersebut dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dilakukan penahanan di rumah," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wazir Iman Supriyanto dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (16/7).

Jaksa menilai Jemy secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam melayangkan tuntutan, Wazir menuturkan terdapat beberapa hal yang memberatkan, yakni Jemy dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, beberapa hal yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, dan memperlancar persidangan serta tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi.

Dalam kasus tersebut, Jemy didakwa memperkaya diri, orang lain, atau korporasi atau menyalahgunakan wewenang dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp

8,03 triliun. Perbuatan korupsi dilakukan bersama dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung pada BAKTI Kominfo Elvanno Hatorangan selaku mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anang Achmad Latif, serta mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.

Selain itu, bersama-sama pula dengan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli (Konsultan) BAKTI Kominfo Yohan Suryanto, Direktur PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki Muliawan, Account Director PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, serta Kepala Divisi Lastmili/Backhaul BAKTI Kominfo Muhammad Feriandi Mirza. **(Ant/Has)-f**

RUGIKAN NEGARA RP 103 M

## Pimpinan Bank Pemerintah Ditahan

**SEMARANG (KR)** - Pimpinan cabang salah satu bank pemerintah di Kota Semarang, berinisial BS ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. BS tersangkut kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit terhadap dua perusahaan pada 2016 hingga 2017.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Ponco Hartanto di Semarang, Selasa (16/7), mengatakan, penahanan dilakukan setelah proses pelimpahan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum. BS merupakan pimpinan cabang bank pemerintah yang menjabat saat

pemberian kredit bagi PT Citra Guna Perkasa dan PT Harsam Indo Visitama. "Setelah dilimpahkan ke penuntutan, tersangka ditahan di Rutan Salatiga," katanya

Selain BS, terdapat tiga tersangka lain yang juga dilimpahkan ke penuntutan dalam perkara ini. Ketiga tersangka tersebut masing-masing AH, DI, dan AS yang merupakan pimpinan perusahaan penerima fasilitas kredit yang diduga dikorupsi tersebut.

Ponco menjelaskan, tersangka AS ditahan bersamaan dengan tersangka BS usai pelaksanaan tahap II

perkara tersebut. Adapun terhadap tersangka AH dan DI, AS, dilakukan pelimpahan berkas ke penuntutan di Lapas Semarang karena keduanya masih menjalani pidana dalam kasus yang lain.

Dalam penyidikan perkara tersebut, menurut Ponco, kerugian negara yang terjadi mencapai Rp 103 miliar. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. **(Ant/Has)-f**

catat 207 orang terdiri atas 184 laki-laki dan 23 perempuan. "Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Indonesia dalam seleksi ini," kata Arif dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/7).

Pansel akan verifikasi dokumen-dokumen yang telah diunggah pendaf-tar, kemudian diumumkan hasilnya pada 24 Juli 2024 melalui aplikasi apel serta laman KPK.go.id dan setneg.go.id.

"Terhitung sejak 24 Juli sampai 24

Agustus 2024, kami mengharapkan masukan dan tanggapan masyarakat atas calon-calon yang telah lolos seleksi administrasi ini. Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi Apel dan email kepada Pansel KPK," ujar Arif.

Setelah pendaftaran dan tahapan seleksi lainnya, akan dipilih 10 nama capim dan 10 nama calon Dewas KPK yang akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo, kemudian diteruskan ke DPR RI. **(Ful)-f**

SINAU SEJARAH DI SMA NEGERI 9

## Paniradya Terus Informasikan Sejarah Keistimewaan DIY

**YOGYA (KR)** - Upaya Paniradya Kaistimewan DIY menginformasikan sejarah keistimewaan DIY ke masyarakat terus dilakukan. Terutama kepada generasi muda.

"Berbagai macam program kegiatan yang kami (Paniradya Kaistimewan) lakukan berkolaborasi bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan juga beberapa komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat DIY mengenai pentingnya mengetahui sejarah dan menjaga keistimewaan Yogyakarta," kata Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSI.

Sosialisasi sejarah keistimewaan dilakukan melalui video dokumenter dari sejarah keistimewaan Yogyakarta, yang ditayangkan lewat *channel* YouTube Paniradya. "Kami juga membuat berbagai macam buku sejarah, dan setiap memperingati hari-hari bersejarah membuat semacam podcast dialog keistimewaan," kata Aris.

Memang, lanjut Aris, hal ini masih membutuhkan proses penyempurnaan. "Kami akan sempurnakan terus berdasarkan data-data dan juga keinginan dari masyarakat Yogyakarta sebagai pengamat hari-hari bersejarah di Yogyakarta," katanya.

Selain itu juga dilakukan oleh OPD terkait, antara lain seperti Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY dengan dioraminya, Dinas Kebudayaan DIY dengan Bus Heritage Track dan Lawatan Sejarah.

Mengenai belum diajarkannya sejarah keistimewaan DIY di sekolah, Aris mengatakan, Paniradya Kaistime-



KR-Wawan Isnawan

**Aris Eko Nugroho SP MSI**

wan merupakan lembaga yang mempunyai ketugasan, salah satunya adalah berkaitan dengan mewujudkan atau tersusunnya bahan urusan keistimewaan Yogyakarta. "Tentu hal ini kami tidak bisa melakukan itu sendiri dan perlu bermitra," katanya.

Untuk mewujudkan mata pelajaran muatan lokal sejarah keistimewaan DIY ini, Paniradya Kaistimewan juga perlu bermitra dengan OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Setelah diluncurkannya buku Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ), semoga muatan lokal bisa masuk di dalamnya.

Terkait target Paniradya Kaistimewan menginformasikan keistimewaan DIY melalui berbagai kesempatan, Aris mengatakan, merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, bahwa keistimewaan DIY berdasarkan sejarah dan asal-usulnya, sehingga semua rangkaian sejarah Yogyakarta menjadi pondasi keistimewaan DIY.

"Banyak peran penting Yogyakarta dalam sejarah perjalanan bangsa yang se-

makin memperkuat keistimewaan Yogyakarta," kata Aris.

Oleh karena itu, lanjutnya, nilai-nilai yang tertuang di dalam sejarah dapat menjadi pondasi guna memantapkan langkah-langkah ke depan dalam hal memperkuat keistimewaan DIY.

Salah satu kegiatan Paniradya Kaistimewan DIY untuk menginformasikan sejarah keistimewaan DIY dilakukan di sekolah melalui Sinau Sejarah.

Kali ini Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY menggelar Sinau Sejarah Keistimewaan 'Undang-undang No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY', Rabu (17/7), pukul 09.00-12.00 di SMA Negeri 9, Jalan Sagan No 1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Acara Sinau Sejarah yang didanai dengan dana keistimewaan (danais) ini ditayangkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Sinau sejarah menyajikan Dialog Keistimewaan 'Undang-undang No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY' dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Dr Y Sari Murti Widiyastuti SH MHum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta) dan Hendro Muhaimin MA (Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pusat Studi Pancasila UGM) dipandu Wijiti Rachmadani (Moderator).

Acara ini dimeriahkan grup Tari Pradnya membawakan tari kreasi 'Ruwat' dan grup band Trappsody dari SMA Negeri 9 serta bintang tamu Sedulur Remix'anAti. **(Wan)**

BERSEDIA BEKERJA PENUH WAKTU

## Dibuka Seleksi Calon Komisioner Perempuan

**JAKARTA (KR)** - Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Komisioner Komnas Perempuan, Melani Budianta mengatakan, pihaknya mencari calon Komisioner Komnas Perempuan yang terpenggil untuk memperjuangkan hak perempuan.

"Orang-orang yang kita cari adalah yang terpenggil untuk memperjuangkan hak perempuan, kita tidak mencari orang yang mencari pekerjaan," kata Melani Budianta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/7).

Untuk itu, ujarnya, syarat bagi calon Komisioner Komnas Perempuan di antaranya tidak sedang menempuh studi/kuliah dan apabila nanti menjabat sebagai Anggota Komnas Perempuan bersedia tidak menempuh studi/kuliah, bersedia bekerja penuh waktu sebagai anggota Komnas Perempuan.

Pasalnya, bekerja sebagai Komisioner Komnas Perempuan menyita banyak waktu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. "Kami menginginkan orang yang memang betul-betul sepenuhnya bekerja untuk Komnas Perempuan. Tidak mungkin dosen untuk melakukan kerja sambil di sini. Bahkan, yang sedang studi juga tidak bisa karena mahasiswa tugasnya banyak," jelas Melani Budianta.

Sejumlah syarat calon antara lain WNI, terlibat secara aktif dalam upaya memperjuangkan hak perempuan sekurang-kurangnya 15 tahun, tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku korupsi, perusakan alam dan kekerasan dalam

ranah domestik, publik dan negara, tidak terlibat dalam perkawinan poligami/poliandri, bukan pengurus atau anggota partai politik.

Selain itu, bisa berasal dari aktivis, akademisi, pensiunan ASN/anggota Polri/TNI, pensiunan jaksa atau mantan diplomat, bersedia bekerja penuh waktu sebagai Anggota Komnas Perempuan serta bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi.

Ia menyebutkan, kriteria calon antara lain memiliki pengetahuan tentang HAM perempuan, termasuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, peraturan perundang-undangan yang relevan dan instrumen HAM internasional, memiliki komitmen dan konsistensi terhadap HAM perempuan terutama dalam penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.

Selanjutnya, memiliki integritas dan pemahaman etika yang mendasar, memiliki keberpihakan terhadap korban, menghormati keberagaman serta peka terhadap perbedaan kondisi fisik dan psikis, agama/keyakinan, ras/etnis, usia, orientasi seksual, asal-usul kebangsaan dan status sosial lainnya serta mempunyai kapasitas kepemimpinan, kematangan kepribadian, kemampuan bekerja sama serta mampu menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Proses pendaftaran calon Komisioner Komnas Perempuan periode 2025-2030 dimulai sejak Selasa (16/7) dan ditutup pada 16 Agustus mendatang. **(Ant/Obi)-f**

SERAHKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI KE DEWAN

## Gibran Lepas Jabatan Walikota

**SOLO (KR)** - Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya ke pimpinan DPRD Kota Surakarta. Surat pengunduran diri tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang ada.

"Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada," kata Gibran usai menyerahkan surat pengunduran diri di Kantor DPRD Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16/7).

Disinggung mengenai alasan pengunduran diri tersebut, menurut Gibran, salah satunya untuk persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober 2024. "Selain untuk persiapan pelantikan 20 Oktober nanti, tentu banyak hal yang harus disiapkan sekarang. Saya mohon doa agar semua dilancarkan," katanya.

Gibran mengucapkan terima kasih kepada media massa karena sudah ikut mengawal program pemerintah di tiga tahun terakhir. "Makasih sudah menjadi teman baik saya, memberitakan hal positif untuk perkembangan Kota Solo. Mohon pamit jika ada yang salah," katanya.

Disinggung mengenai kegiatannya se-

belum pindah ke Jakarta, Gibran mengaku akan membereskan rumah dinas Loji Gandrung dan ruangan kantornya di Kompleks Balai Kota Surakarta. "Kan yang menempati nanti pak wakil walikota. Intinya surat pengunduran diri sudah saya serahkan, akan ditindaklanjuti Ketua DPRD, lalu ke provinsi, lalu ke Kemendagri," katanya.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo mengatakan, tahapan surat tersebut akan dibahas dan dikaji dengan pimpinan yang lain. "Kemudian kami lihat sesuai aturannya seperti apa. Nanti kami ambil langkah untuk dijadwalkan di badan musyawarah. Untuk jadwal bulan ini sudah terjadwal, nanti kalau ada paripurna pengunduran diri tentunya jadwal yang di bulan ini akan kami sesuaikan," jelasnya.

Mengenai persetujuan akan dihasilkan pada rapat paripurna. Selanjutnya, berkas akan dikirimkan ke Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. "Di Kementerian Dalam Negeri akan keluar SK pemberhentian sekaligus pengangkatan wakil walikota sebagai Plt. Itu nanti juga akan kami sampaikan di paripurna," pungkasnya. **(Ant/Has)-f**



KR-Antara/Yusuf Nugroho

**PEMBAGIAN NASI JANGKRIK:** Warga antre saat tradisi pembagian nasi jangkrik (nasi berlauk daging kerbau dan kambing) di Kompleks Maham dan Masjid Menara Kudus, Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (16/7/2024). Tradisi membagi nasi jangkrik saat puncak acara buka luwur Sunan Kudus dengan membagikan 43.000 bungkus kecil dan 2.000 bungkus besar nasi jangkrik yang dibungkus daun jati kepada warga sekitar itu sebagai syukur kepada Tuhan atas berkah sandang dan pangan serta untuk menumbuhkan rasa saling berbagi kepada sesama.